

2009-06-009

Perlunya Manajemen Wilayah Untuk Meningkatkan Daya Tangkal Masyarakat

Erna S. Widodo

PENDAHULUAN

BOM, yang meledak di mana-mana menampar wajah bangsa.

Seolah Indonesia benar-benar tidak berdaya terhadap gangguan yang mengancam negeri ini. Aksi

bunuh diri yang diperagakan (kalau betul, dia adalah pemuda

Indonesia) 1 Oktober 2005 di

Bali, dan menelan korban 23 orang meninggal dan sekitar 100 orang luka-luka, dan terbunuhnya

Dr. Azahari dkk, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia benar-benar mengalami masa suram yang luar biasa dari sisi keamanan.

Yang lebih memprihatinkan adalah kesan bahwa masyarakat seperti tidak peduli terhadap setiap kejadian yang menimpa warganya. Budaya masa bodoh yang cenderung mudah mencari kesalahan orang lain menyebabkan kinerja Polri tampak dianggap tidak serius, dan begitu mudahnya masyarakat berlomba untuk saling menyalahkan satu sama lain tanpa berpikir untuk membuat suatu perubahan pemikiran agar menimbulkan perasaan "greget" yang sama untuk menyelamatkan bangsa ini. Padahal, tanpa adanya kesamaan greget, bangsa ini akan segera hancur berkeping-keping seperti yang terjadi di Negara lain. Itulah sebabnya mengapa begitu pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu ikatan NKRI

melalui Pembinaan Wilayah untuk menghidupkan greget itu kembali.

Era reformasi ini, selain bertujuan menciptakan Indonesia serba baru juga diharapkan dapat mempertebal kesadaran dari seluruh warga untuk berwasan keamanan. Kita tidak mungkin dapat bekerja dengan baik tanpa adanya jaminan keamanan. Dengan demikian, kehidupan politik, ekonomi, teknologi tetap berjalan dengan lancar, kesejahteraan terjamin, namun keseimbangan keamananpun tetap terjaga. Atau dengan kata lain mewujudkan kemakmuran dengan memupuk keamanan. Sebuah cita-cita yang sederhana walaupun hasilnya tidak sederhana.

Keamanan bukan mutlak hanya menjadi tanggung jawab POLRI dan TNI. Keamanan harus menjadi tanggung jawab seluruh bangsa, mulai dari masyarakat yang berada di RT/RW, seluruh lapisan masyarakat yang tergabung dalam setiap organisasi, kemudian Aparat Pemerintahan yang berada di Pemda yang di topang oleh kekuatan POLRI dan TNI. Agar Ketahanan Nasional terwujud, maka salah satu cara efektif untuk meningkatkan keamanan adalah meningkatkan semangat kebangsaan. Untuk sampai ke tataran itu perlu suatu wadah. Apapun bentuk

wadah itu dapat kita pikirkan kemudian, yang penting dalam Manajemen Wilayah perlu pembinaan yang sinergis dan *terintegrated*.

Pemikiran ini tentu saja jangan langsung dikaitkan dengan upaya memunculkan "TNI" isme kembali dalam kehidupan reformasi. Mungkin, pada era tertentu pembinaan teritorial pernah terkesan didominasi oleh TNI, sehingga dalam melaksanakan tugasnya para personal TNI tampak berlebih-lebihan yang berakibat menimbulkan sikap *a priori* terhadap TNI secara keseluruhan. Tapi, bukan berarti bahwa yang berbau TNI harus langsung di vonis negatif, sikap *a priori* terhadap TNI hendaknya dapat dikendalikan dalam perspektif pandang yang rasional, professional dan proporsional. Kesalahan persepsi beberapa anggota TNI dalam membicarakan pelaksanaan tugasnya pada waktu itu, tidak bisa serta merta diasumsikan sebagai kesalahan TNI sebagai institusi, yang harus di "hukum" sepanjang masa. Oleh sebab itu, kini tiba saatnya kita berfikir dengan pikiran jernih dan kedamaian hati, mumpung negara sedang dalam situasi damai (negara tidak dalam keadaan perang) kita evaluasi kembali perlunya peran serta TNI membantu masyarakat untuk meningkatkan kemampuan daya tangkal-

nya dalam menghadapi berbagai ancaman. Tentu harus dikendalikan oleh suatu sistem yang dapat diciptakan untuk itu agar peran serta TNI ini dapat dilaksanakan dalam situasi yang harmonis, dan tentu saja harus ada kesediaan dari semua pihak untuk bersedia melepaskan berbagai kecurigaan yang berlebihan.

Saat ini korban telah berjatuhan, demokrasi yang membuka lebar seluruh aspek (IPOLEKSOSBUDHANKAM) telah dibayar rakyat dengan sangat mahal dan berdarah-darah. Disadari atau tidak bangsa ini telah menjadi korban penetrasi dari luar yang memporakporandakan sistem keamanan bangsa. Coba kita amati bahwa ketika koridor demokrasi mulai dibuka dengan munculnya berbagai partai politik, bangsa ini mengharap kehadiran mereka akan memunculkan kecerahan baru. Namun ternyata partai politik yang awalnya memberikan janji mendayu-dayu itu tidak ada satupun yang secara jelas menjajikan masalah keamanan. Bagi banyak partai politik isu keamanan tidak akan banyak mendatangkan pemilih. Keamanan dianggap sebuah isu di luar demokrasi. Isu keamanan (dengan asumsi TNI dibalik itu) dianggap justru akan membelenggu demokrasi. Padahal justru keamanan itulah cikal bakal

demokrasi. Kalau dahulu bangsa Indonesia terkenal dengan keramahan penduduknya dan berbagai daya tarik budayanya, maka kini Indonesia justru sangat menakutkan karena begitu kacaunya negeri ini. Dunia internasional menjadi ngeri datang ke Indonesia karena berbagai alasan ketidaknyamanan dan ketidakamanan. Sehingga jutaan dolar menguap begitu saja karena keadaan negeri yang tidak kondusif.

MENGENAL MANAJEMEN WILAYAH DAN PEMBINAAN SISTEM WILAYAH

Konsep utama manajemen wilayah adalah pembinaan wilayah yang diarahkan pada kesejahteraan dan berdaya gunanya semua unsur masyarakat bagi pertahanan dan keamanan wilayah, serta seluruh potensi isinya dalam wilayah tersebut. Dalam aplikasi sistem pembinaan, permasalahan wilayah mestinya harus dipelajari secara terus menerus dengan mempelajari kondisi dan situasi yang sedang berlaku. Ada tiga faktor utama yang harus diperhatikan dalam pembinaan wilayah yaitu : 1) GEOGRAFI, sebagai faktor wadah, 2) DEMOGRAFI, sebagai faktor isi, dan 3) Kondisi IPOLEK-

SOSBUDMILAG, sebagai faktor kehidupan masyarakat, perpaduan perkembangan dari ketiga unsur tersebut di atas. Dalam proses selanjutnya, ketiga unsur akan mengalami pertumbuhan dan perubahan secara terus menerus. Oleh karena itu permasalahan wilayah yang selalu mengalami perubahan perlu diikuti dan dianalisa secara terus menerus pula agar kita akan selalu memperoleh data "Up-to date" yang sanggup menjawab setiap tantangan pada setiap saat dan tempat, atau mampu memberikan daya dan hasil guna yang sebesar-besarnya bagi penggunaan unsur-unsur potensi wilayah tersebut.

Pembinaan wilayah itu sendiri sebenarnya harus disangga bersama oleh seluruh komponen masyarakat, (termasuk TNI di dalamnya), jadi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab TNI seperti yang diasumsikan selama ini. Kerancuan pikir ini hendaknya jangan menumbuhkan sikap paradoks yang akan mendikotomikan posisi TNI dan SIPIL, di satu sisi ingin membebaskan tanggung jawab keamanan terhadap TNI, tapi di sisi lain tumbuh rasa khawatir dan curiga yang berlebihan terhadap munculnya TNI-isme, atau bahkan menimbulkan sikap ambivalen antara benci tapi rindu terhadap TNI. Coba kita amati apa yang tercantum

dalam *Vademecum Teritorial*, tentang pembinaan wilayah, ABRI hanyalah sebagai alat HANKAM dan sebagai kekuatan sosial. Oleh sebab itu, partisipasi TNI dalam rangka pembinaan wilayah ini sebenarnya sangat dapat dimanfaatkan dalam wujud membantu operasi-operasi bhakti yang ada di keseharian masyarakat, yang mana tujuannya ikut serta mencapai kesejahteraan rakyat dan sekaligus membantu Polisi dalam pengawasan keamanan. Potensi ini disaat aman jangan dibiarkan mubazir dan tidak dimanfaatkan secara optimal hanya karena adanya trauma masa lalu yang berlebihan dan tak kunjung padam.

Kekayaan alam yang menjadi potensi kekuatan Geografi, yang pada awalnya statis juga dapat diolah dan diubah menjadi dinamis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Kondisi ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat, seperti yang tercermin dalam Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), bahwa kewenangan daerah sebagaimana yang diatur dengan UU 22/1999 memungkinkan daerah untuk melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alamnya. Kewenangan ini juga memungkinkan keterlibatan masyarakat setempat dalam pengelolaan sum-

ber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. Nah, sepanjang proses tersebut kita dapat memanfaatkan potensi-potensi lain yang dapat menjamin keamanan masyarakat dalam optimalisasi sumber kekayaan alam.

Pembinaan unsur Demografi pun dapat menjadi kekuatan. Usaha ini meliputi penilaian terhadap kualitas penduduk atas fungsinya dalam masyarakat. Analisa medan diperlukan terhadap kemungkinan munculnya ancaman, tantangan dan hambatan. Penyusunan penduduk sebaiknya disesuaikan dengan "kedudukan", atau dikelompokkan ke dalam komponen fungsional yang diarahkan untuk menjadi kekuatan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan kesejahteraan pada umumnya. Apabila keadaan mendesak, atau negara dalam keadaan bahaya baik yang signifikan atau tidak, komponen demografi ini dapat dimanfaatkan berdasarkan fungsi-fungsi utama penyelenggaraan keamanan rakyat, karena rakyat sendiri telah tumbuh *sense of crisis* untuk itu. Jadi, kita semua tidak perlu terkaget-kaget dan terdadadadad. Apalagi saling tuding dan saling menyalahkan.

Semua komponen harus terpanggil untuk bertanggung jawab membela bang-

sa yang sedang sakit ini. Komponen bisa terdiri dari unsur SIPIL sebagai komponen perlawanan intelektual dan juga dari unsur masa non militer yang tidak bersenjata. Sedangkan Polisi yang dibantu TNI, mempunyai posisi sebagai komponen perlawanan bersenjata. Jadi, fungsi utama dalam keadaan damai hendaknya diarahkan untuk kepentingan-kepentingan kesejahteraan, sedangkan dalam keadaan darurat maka kekuatan tersebut bisa menjadi asset negara untuk melawan musuh apapun bentuknya. Melalui pembinaan yang konsisten dan perbaikan sistem yang terus-menerus, komponen ini harus terus dipelihara dan dipersiapkan agar tetap mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk menghadapi keadaan darurat dan bahkan keadaan perang.

Dalam posisi inilah diperlukan kerja sama yang terpadu antara SIPIL, Polisi dan TNI. Bila ke tiga unsur ini telah terpadu langkah selanjutnya adalah membuat system yang jelas. Caranya, dengan: (1) Mengidentifikasi seluruh masalah ancaman bangsa baik yang langsung kelihatan (Hankam) maupun yang tidak langsung kelihatan (Ipolek-sosbud). (2). Mengklasifikasikan Daerah menurut tingkat kerawanan, (3). Mempetakan Daerah dan membentuk kantong-kantong manajemen wilayah

sesuai kondisi geografi dan demografi, juga termasuk karakter etnis penduduk setempat serta tingkat rata-rata SDM-nya, dan (4). Mempersiapkan Operasi Pertahanan rakyat semesta. Di sini dapat dipelajari secara cermat, di mana sumber masalah, di mana letak sasaran vital yang bermasalah, di mana jalan pendekat utama menuju sasaran, di mana sumber-sumber pokok sebagai kekuatan logistik yang dapat memberikan suplai secara kontinu, dan di mana pangkalan-pangkalan strategis untuk melakukan perlawanan. Pemikiran utama adalah kemungkinan ancaman dan jalan pendekat perlawanan dan atau jalan pendekat rencana perlawanan untuk mengadakan ofensif sampai batas wilayah musuh, kemudian daerah yang kemungkinan dijadikan daerah basis dan atau daerah pangkalan, serta sumber-sumber pokok yang terpadu.

Pembentukan kantong-kantong untuk mempermudah pembinaan manajemen wilayah berdasarkan peta Daerah tujuannya adalah untuk mengoptimalkan SDM penduduknya agar potensi geografi yang ada dapat ditingkatkan dan daerah tersebut diharapkan akan mampu mengatasi kebutuhannya. Dengan demikian dalam keadaan apapun baik kondisi bertahan maupun kondisi melawan, setiap operasi-operasi dapat di-

laksanakan secara terus menerus oleh kantong-kantong itu sendiri maupun dengan kantong lain tanpa harus tergantung dari pemerintah pusat.

Pada prinsipnya kalau kita telah mampu melakukan pembinaan geografi sebagai sarana dan demografi sebagai faktor aset SDM, bisa dikatakan bahwa kita telah mampu menggerakkan kedua paduan potensi tersebut. Maka langkah selanjutnya adalah upaya untuk mengelola kondisi sosial tadi sebagai subjek pembinaan agar menjadi kekuatan sosial. Apa bila kondisi sosial yang kondusif dapat terwujud maka diharapkan akan mampu menjadi bahan dasar penyusunan potensi Hankam. Langkah-langkah tersebut di atas dapat dianggap sebagai evolusi perubahan pola pikir masyarakat menuju kepada kesadaran diri (*self awareness*) tentang bela negara untuk kemudian berubah dan muncul rasa respek (*self respect*) pada negaranya. (*Consortium for Research on Emotional Intelligence in Organisations, "About Us", 2001, [http / www.eiconsortium.org/ aboutus.htm](http://www.eiconsortium.org/aboutus.htm) & Kotter, *The heart of change*, 2002).*

Sebenarnya tidak terlalu sulit memahami situasi emosi masyarakat saat ini. Kalau di kaji secara mendalam, penyebab anak bangsa yang kehilangan res-

pek terhadap negaranya, sebenarnya bukan semata-mata karena merasa malu terhadap keterpurukan ekonomi bangsa ini, tetapi lebih pada rasa kecewa terhadap para pemimpinnya yang gagal memberikan teladan yang baik bagi kemajuan negara. Dari rasa kecewa tumbuh berbagai kelompok sikap yang berbeda. Banyak di antaranya yang hanya bisa merasa masgul tanpa mampu berbuat apapun. Namun ada pula yang berjiwa spekulatif, mampu memanfaatkan situasi keterpurukan ini menjadi suatu peluang yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau kelompoknya.

Seperti yang sudah dibahas di atas, bahwa secara normatif subyek pembinaan wilayah itu melibatkan seluruh Aparat pemerintah, lembaga pemerintah maupun swasta termasuk masyarakatnya. Tetapi ditinjau dari hakikat dan kepentingan negara, maka unsur-unsur manajemen wilayah (Aparat) merupakan penanggungjawab keberhasilan pembinaan wilayah. Jalur-jalur subyek pembinaan wilayah dapat kita kelompokkan dalam *Formal Leader* dan *Informal Leader* dengan pendekatan budaya lokal. Seperti yang dikatakan oleh Hughes bahwa pembinaan wilayah seharusnya melibatkan *independent organisations* sebagai agen pemerintah

yang dapat memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat dan memberikan kekuatan kepada pemerintah untuk mencapai tujuannya. Di samping itu juga perlu ditunjang dengan informasi pers dan teknologi mutakhir. Jalur ini merupakan jalur kuat yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan keberhasilan Pembinaan Wilayah (Binwil).

Titik berat perhatian hendaknya pada mempersiapkan ketahanan mental rakyat. Ketahanan mental rakyat ini penting karena merupakan kunci kesediaan rakyat untuk bersedia berkorban bagaimanapun beratnya, termasuk ketahanan mental apabila Negara dalam keadaan bahaya sehingga Panglima Tertinggi (Presiden) terpaksa harus mengumumkan perang. Pengorbanan tersebut harus dilandasi dengan kesadaran bahwa perang tersebut terpaksa diadakan demi keadilan dan keselamatan bangsa, kemudian rakyatpun harus diberi penjelasan tentang segala konsekuensinya sampai kemenangan akhir tercapai. Pada dasarnya apabila rakyat tahu maksud dan tujuan utama setiap usaha penanganan, asal tidak berlebihan, rakyat akan mendukung usaha tersebut.

Pembinaan Wilayah melalui manaje-

men wilayah tentu harus melalui suatu proses pemikiran yang matang, perencanaan yang solid, teliti dan terperinci, kemudian pengorganisasian yang jelas, pelaksanaan di lapangan yang empatik dan kontrol dari unsur pimpinan yang ketat. Bukan tidak mungkin semuanya telah dilaksanakan dengan baik, tapi justru dilapangan terjadi *error* karena ketidak fahaman para pelaksananya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, sehingga justru menimbulkan antipati masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan kekuatan dasar masyarakat agar mau menyatu dengan program Binwil tersebut perlu adanya pemahaman dari para pelaksana Binwil di lapangan, seperti misalnya: adanya kesatuan komando, memiliki keunggulan moril, fleksibilitas dalam pemikiran, kesederhanaan dalam berperilaku sehari-hari, kemampuan mobilitas yang tinggi walau memiliki keterbatasan dana, memiliki kesemestaan wawasan, keunggulan moril dan tidak mengenal menyerah. Sementara itu perlu pula adanya pengarahan yang jelas terhadap masyarakat tentang perlunya perlawanan yang teratur dan terus menerus terhadap potensi ancaman Negara, kesadaran tentang perlunya keutuhan dan kesatuan ideology politik, penyebaran faham untuk bersedia menghindari pemusnahan.

Perlu disadari bahwa bimbingan wilayah akan selalu berhadapan dengan masalah sosial yang sangat kompleks, karena ruang lingkungnya luas dan banyaknya dimensi yang berbeda. Di samping itu banyak Badan Pemerintah lain yang menggarap kegiatan-kegiatan dalam wilayah yang sama, sehingga mudah terjadi *overlapping* dan sukar dibedakan secara jelas siapa menggarap apa. Oleh sebab itu, sentralisasi perencanaan dan desentralisasi perencanaan adalah mutlak perlu. Untuk menghindarkan duplikasi pembinaan harus ada pembagian tugas dan hubungan kerja sama dengan Badan-Badan Pemerintah lainnya.

KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMAHAMI GANGGUAN

Pembinaan wilayah melalui manajemen wilayah, unsur utamanya adalah masyarakat. Masyarakat yang sadar adalah masyarakat yang memiliki *sense of belonging* terhadap segala macam masalah bangsa. Kesadaran masyarakat tidak datang secara tiba-tiba. Ada suatu proses menuju kesadaran, yaitu diawali dengan rasa percaya terhadap akan terjadinya suatu perubahan menuju situasi yang kondusif. Kesad-

darannya harus dibangun. Situasi yang kondusif tentu saja harus datang dari pemerintah berupa *Good Will* untuk melakukan perbaikan dari segala aspek kehidupan. Untuk ini perlu sikap *low profile* Pemerintah dalam kesediaannya mendengarkan apa yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat kita pada umumnya. Pemerintah hendaknya tidak selalu menciptakan suatu lingkaran berupa harapan kosong serta membuat keputusan-keputusan yang bisa saling merugikan.

Masalah ekonomi yang ruwet menyebabkan bangsa ini makin terpuruk. Masyarakatpun makin tercepit dan terhimpit yang menyebabkan mereka begitu mudah marah dan merasa sakit hati. Kemarahan yang tidak pernah ditangani Pemerintah secara serius dan tuntas menyebabkan mereka semakin depresi, apatis atau bahkan anarkhis. Bisa difahami bahwa masalah yang dihadapi Pemerintah begitu ruwet. Mungkin belum ditemukan suatu sistem yang tepat untuk menangani masalah ekonomi ini, apalagi menangani seluruh masalah bangsa yang juga sangat kompleks. Namun, kecurigaan (*mis-trust*) masyarakat hendaknya segera dijelaskan satu persatu secara gamblang dan kesatria oleh Pemerintah, agar masyarakat segera dapat menunjukkan

sikap percaya (*trust*). Sikap percaya pada Pemerintah inilah yang dapat dijadikan asset untuk bekerja sama dalam membangun kembali negara ini. Kita perlu memberdayakan masyarakat untuk bersama-sama membangun bangsa dalam rangka bela negara.

Sebenarnya, apakah yang dimaksud dengan masyarakat? Pada umumnya gambaran kita akan tertuju kepada WANRA yang langsung membantu tentara atau Hansip yang membantu Pemerintah yang nantinya akan bersama TNI melakukan perlawanan bersenjata terhadap setiap musuh Negara baik di dalam maupun yang berasal dari luar negeri. Sesungguhnya bukan hanya itu! Yang dimaksud dengan masyarakat adalah seluruh rakyat tanpa kecuali baik tua, muda, besar, kecil, laki-laki ataupun perempuan. Kekuatan harus disiapkan jauh sebelum terjadi sesuatu atas negeri kita dari potensi ancaman bahaya, atau dengan kata lain pembinaan masyarakat justru harus disiapkan pada saat dalam keadaan aman. Kemudian, siapakah yang harus menyiapkan? Tentunya Aparat keamanan (Polisi yang dibantu TNI) dan Aparat pemerintahan. Oleh karena itu di samping para Aparat melakukan pembinaan terhadap Hansip, maka rakyat yang lainpun perlu mendapatkan pembinaan secara bertahap.

Adakah Kelompok yang terlupakan?

Kita dapat melihat kelompok masyarakat yang dapat diklasifikasikan, misalnya: 1) Kelompok-kelompok kecil yang sering membuat onar, atau selalu menjadi sumber keresahan. 2) Kelompok masyarakat yang netral, dan 3) Sebagian besar masyarakat yang sebenarnya tidak mendukung keresahan tersebut. Namun, untuk menyelesaikan setiap masalah, pada umumnya pusat perhatian Aparat hanya ditujukan kepada sekelompok kecil masyarakat yang menjadi penyebab keresahan, tanpa menyadari bahwa kelompok masyarakat lain yang jumlahnya jauh lebih besar menjadi terlupakan. Padahal bila dibina secara baik, golongan masyarakat itu justru dapat dimanfaatkan untuk ikut serta mengatasi sekelompok kecil masyarakat yang menjadi penyebab keresahan tersebut. Perhatian secara khusus memang harus ditujukan kepada penyebab keresahan, tetapi golongan masyarakat lainnya yang jumlahnya justru jauh lebih besar hendaknya tidak dilupakan. Sebelum mereka menjadi masa bodoh atau apatis, setiap bangsa ini menghadapi persoalan, sebaiknya mereka selalu dilibatkan dalam berbagai pembahasan. Berbagai seminar dan diskusi telah digelar, setiap pendapat telah dirumuskan namun tampaknya

tidak ada hasil yang jelas yang dapat dijadikan patokan untuk menyelesaikan masalah bangsa yang begitu makin kisruh dan berlarut. Apa sebab? Mungkin karena tidak ada wadah struktural yang jelas untuk mengolah hasil pemikiran-pemikiran cerdas tersebut dan tidak ada pula benang merah yang mengikat antara satu wadah ke wadah lain.

Coba kita ingat, dulu kita mengenal Pusat Pengendalian Ketegangan Sosial (PUSDALGANGSOS) yang dikendalikan oleh Pemda dan Pusat Pengendalian Ketegangan Krisis (PUSDALGANGSIS) yang dikendalikan oleh APTER. Pembagian tugasnya jelas, misalnya: pada saat di suatu daerah aman atau, resah (ada gejolak) sampai dengan terjadi keresahan, kendali dipegang oleh Pemda, tetapi begitu kondisi krisis kendali diambil alih oleh APTER. Perpindahan kendali dibahas melalui kesepakatan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida).

Aparat Pemda memiliki perangkat sampai ke tingkat desa yang disebut Lurah atau Kuwu, sementara Apter pun mempunyai perangkat sampai ke tingkat desa yang disebut Bintara Pembina Desa (BABINSA). Pada waktu itu karena kekurangan tenaga teknis, pada umumnya para Babinsa ini terpaksa memiliki wi-

...
...
...
...
...



...
...
...
...
...

beragai rangsangan telah dikemas lebih spesifik. Itulah sebabnya mengapa mereka menjadi sangat rawan terhadap rayuan-rayuan kenikmatan khususnya penggunaan narkoba. Di samping itu ada bentuk lain yang sering dibahas para pakar yaitu berupa penjajahan ekonomi yang mengarah pada pemanfaatan Indonesia sebagai pasar, atau lahan buangan barang bekas dan yang telah kedaluwarsa. Anehnya, masyarakat Indonesia pada umumnya tidak menyadari atau tidak mau tahu akan bahaya yang telah masuk ke dalam dirinya.

Kemiskinan selalu dijadikan kambing hitam sebagai pemicu ketidakamanan. Namun ironisnya di balik itu, pada saat ini kemiskinan justru tampak menjadi komoditas baru. Bahkan untuk sekedar berlindung dari kemalasan, berbagai kelompok yang mengatas namakan pembela kaum miskin pun tergoda menggunakan kemiskinan sebagai wadah untuk mencari popularitas. Kemiskinan oleh sebagian orang tertentu telah dijadikan alat pembenar untuk melakukan tindakan kriminal atau melakukan tindakan asusila yang secara akumulatif justru dapat menjatuhkan nilai-nilai harga diri bangsa.

Oleh sebab itu, masyarakat harus segera di sadarkan pada pentingnya pe-

mahaman nilai-nilai harga diri, melalui pembentukan kekuatan dalam wujud kemandirian nasional, pemeliharaan daya tahan sehingga menjadi daya tahan nasional, penggalangan kesiapsiagaan yang terus menerus melalui kantong-kantong Daerah sehingga menjadi kesiagaan nasional, dan menyadarkan masyarakat dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk penanggulangan tantangan-tantangan baik positif maupun negatif yang harus ditanggulangi.

Sebenarnya masalah keamanan ini telah diupayakan dengan berbagai cara dan berbagai model oleh Pemerintah, baik melalui Polisi, TNI atau BIN dan sebagainya. Mereka telah membuat satuan-satuan yang disiapkan untuk itu. Namun, semua itu akan sia-sia apabila filosofi keamanan itu sendiri tidak dimaknai oleh masyarakat sebagai suatu keharusan. Keamanan haruslah dijadikan tujuan utama bangsa. Sosialisasi tentang perlunya keamanan haruslah dibuat segenyar mungkin. Baik keamanan fisik maupun keamanan non fisik yang akan mengganggu tata nilai bangsa. Masyarakat harus didorong untuk menolak sumber-sumber atau cikal bakal penyebab munculnya kemaksiatan, kekerasan, ketidak pantasan dan kekonyolan bangsa. Masyarakat harus

diajak kembali melihat harkat manusia melalui pola hidup sederhana. Kesederhanaan hendaknya menjadi model ciri-ciri modernisasi kaum intelektual. Kaum intelektual hendaknya mampu menampilkan citra diri sebagai pelopor modernisasi yang cenderung digandrungi masyarakat. Dan, kaum intelektual sendiripun hendaknya jangan terjebak dalam pola hidonisme yang akan melunturkan kualitas intelektualnya. Pejabat, di manapun posisinya, hendaknya dapat mencerminkan sikap intelektual dan mampu menjadikan diri panutan bagi masyarakat di sekitarnya. Sikap jor-joran yang diperagakan para pejabat selama inilah yang menyebabkan timbulnya rangsangan negatif tidak langsung bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pemerintah harus berani memulai mengambil sikap untuk memimpin berbagai gerakan moral. Pemerintah melalui para pemimpinnya harus segera memegang kendali moral. Sementara definisi moral haruslah difahami dengan baik dan benar oleh seluruh komponen pemerintahan. Artinya, siapapun yang duduk di posisi Pimpinan bangsa harus mampu menjadi contoh positif, dan siap di turunkan apabila terjadi penyimpangan baik yang dilakukan pribadi maupun kelompoknya.

MANAJEMEN WILAYAH DAN OPINI PUBLIK DALAM MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT UNTUK PEMBERANTASAN GANGGUAN BANGSA.

Dalam *"The Heart Of Change"*, Kotter mewanti-wanti bahwa perubahan harus dilakukan secara hati-hati dan tidak bisa dipaksakan secara serentak. Yang harus digarap adalah pikiran (*cognitive*) masyarakat, agar pikiran tersebut dapat mempengaruhi perasaannya (*Afective*). Bahkan, menurut Koter,

"The Army officier doesnot pull together his new change team with a rational argument. Instead, he shocks by taking risk for the greater good with his comment in a meeting. He then help them begin to tell emotion packed stories around a camphire. More positive feelings and trust grow, making them act as an effective team".

Jelas, bahwa membawa masyarakat untuk memahami program pemerintah tidak boleh ceroboh. Bahkan organisasi tentara yang paling solidpun tetap memperhitungkan resiko, dan memperhatikan perasaan hati timnya sehingga perubahan akan selalu direspon dengan

perasaan damai. Untuk itu perlu suatu wadah yang jelas, sistem yang jelas, penanganan yang jelas, manajemen yang jelas dan yang tidak kalah penting adalah komunikasi yang jelas untuk membahasakan segala sesuatu yang ingin di sampaikan pemerintah kepada rakyat. Komunikasi yang jelas diperlukan untuk menghindari salah persepsi masyarakat terhadap apa yang dikehendaki Pemerintah. Untuk itu diperlukan komunikator yang handal dan peka untuk menampung opini publik. Di Amerika ada lembaga yang mengukur opini publik seperti *American Institute of Public Opinion*. Dulu di Indonesia ada Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum yang dipunyai Departemen Penerangan. Sekarang sudah tidak ada lagi.

Seperti yang dikatakan Bogardus dalam Dwijowijoto bahwa publik adalah orang yang tidak saling mengenal, tetapi memiliki perhatian yang sama dalam sesuatu hal karena terjadi suatu reaksi psikis, walaupun tidak saling terikat pada tempat yang sama. Nah, opini publik tentunya adalah pendapat masyarakat yang diungkap baik lisan maupun tertulis. Dengan demikian, pendapat merupakan sikap masyarakat yang dinyatakan secara verbal. Dalam opini publik selalu terjadi *polarisasi* opini antara yang mendukung dan me-

lawan (kontra), apalagi mengenai isu yang menyangkut kepentingan umum. Itulah sebabnya opini publik harus di dengar secara teliti, telaten dan disikapipi oleh Pemerintah secara wajar. Pengikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan gangguan bangsa adalah bagian dari Manajemen Wilayah. Maka, bagi setiap pemimpin politik dan pemerintahan, apakah Aparat Pemerintahan, POLRI maupun TNI, opini publik adalah factor yang sangat menentukan. Di negara totaliter maupun negara demokratis setiap pemimpin "dipaksa" untuk mau mencermati opini publik, yang berbeda hanya kadar pengaruhnya saja. Terbukti bahwa opini publik memberikan pengaruh signifikan terhadap kemenangan partai politik pada pemilu lalu, dan bahkan mampu mengusung Presiden baru. Namun opini publik itu pulalah yang akan dapat memberikan dampak paling negatif terhadap popularitas para pemimpin negara ini, yang berakibat pada semakin terpuruknya nasib bangsa kita. Oleh sebab itu, seluruh Aparat Pemerintah (*Formal leader*) dan para tokoh masyarakat (*Informal Leader*) hendaknya duduk bersama secara damai, membuat *political agenda setting* yang akan menentukan kebijakan publik yang harus diambil dalam rangka menentukan penataan (sistem) kehidupan bersama.

Polisi tidak bisa jumawa dengan mengabaikan eksistensi TNI, karena mereka mempunyai filosofi pemeliharaan keamanan dan fungsi perlindungan yang sama. Demikian pula Aparat Pemerintahan (Pemda) pasti akan pontang-panting kalau hanya memberdayakan masyarakat tanpa bantuan TNI dan POLRI. Semua upaya harus dipadukan secara sinergis tanpa membesar-besarkan rasa curiga satu sama lain. Apabila semua sistem sudah tertata, maka tidak terlalu sulit untuk membawa masyarakat menuju kejayaan bangsa. Sekian. □

DAFTAR PUSTAKA

1. Hughes, Owen E. *Public Management and Administration*. New York: ST. Martinâ™s Press, INC. 1994.
2. Kepolisian Negara RI. *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002*. Bandung: Fokus Media. 2003.
3. Kotter, John P. *The Heart Of Change*. New York: John P Kotter & Delotte Consulting Ltd. 2002.
4. Mabes TNI-AD.. *Vademecum Teritorial*. Jakarta: Staf Teritorial Mabes TNI-AD. 1982.
5. Nugroho, Riant. *Komunikasi Pemerintahan*. Jakarta: PT. Gramedia. 2004.
6. Otonomi Daerah. *Konsep Implementasi dan permasalahan*. Jakarta: APKASI. 2002.
7. Staf Umum Teritorial TNI-AD, *Manajemen Kebijakan dan Strategi Pembinaan Teritorial*. Jakarta: 1985.
8. Stoltz, Paul G. *Adversity Quotient*. USA, John Wiley & Son, Inc. 1997.